



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: Kepala Badan BNPB
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 13 Desember 2021.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Perkembangan penanganan Bencana dan Persiapan Mitigasi Bencana Serta Penanganan Bencana
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 41 dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 9 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Kepala Badan BNPB Beserta Jajaran.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana membahas "**Perkembangan Penanggulangan Bencana dan Persiapan Mitigasi Bencana di Akhir Tahun 2021 dan Awal Tahun 2022 serta Penanganan Bencana Gunung Semeru**", disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

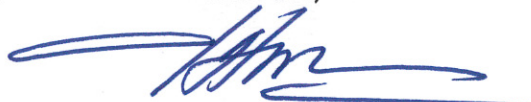
1. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana pada akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022 untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dan harta benda terdampak bencana.
2. Komisi VIII DPR RI mendukung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi dalam penanganan Bencana Gunung Semeru khususnya terkait relokasi korban bencana dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada, baik Gubernur Jawa Timur, Bupati Lumajang dan Kementerian/Lembaga terkait agar penanganan bencana berjalan efektif, efisien dan komprehensif.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menjelaskan secara ilmiah dan transparan terkait kebijakan Karantina bagi WNI yang baru pulang dari Luar Negeri termasuk besaran biaya.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengantisipasi dan mewaspadai munculnya gelombang ketiga varian baru Covid-19 yaitu Omicron dengan mengedepankan kepatuhan pada protokol kesehatan.
5. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Responsif dalam menindaklanjuti informasi bencana di daerah yang memiliki potensi rawan bencana khususnya yang sudah di kunjungi Komisi VIII DPR RI
  - b. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar lebih selektif dan bijak dalam menyampaikan informasi kebencanaan sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat.
  - c. Menginventarisir kembali data daerah rawan bencana khususnya daerah rawan banjir dan longsor.
  - d. Mengkoordinir pengelolaan dan penyaluran logistik bencana agar efektif dan tepat sasaran.

- e. Mengintensifkan program mitigasi di daerah-daerah rawan bencana untuk meminimalisir jumlah korban.

### III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,



H. YANDRI SUSANTO, SPT.